

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak menyebarnya Covid-19 di Indonesia yang dimulai pada tahun 2020, masyarakat Indonesia mendapati bahwa situasi sangat tidak mendukung untuk melakukan aktivitas secara normal dan dilakukan dengan mobilitas yang tinggi. Virus Covid-19 ini memaksa masyarakat untuk membatasi interaksi antar individu dikarenakan tingginya potensi penularan covid-19. Dengan situasi tersebut, berbagai kalangan masyarakat harus beradaptasi dengan cara melaksanakan kegiatan mereka, dengan WFH atau *Work From Home*.

Mungkasa (2020) menyatakan bahwa; Penerapan bekerja dari rumah sebagian besar bersifat sukarela sesuai kebutuhan. Namun, keberadaan pandemi Covid-19 menjadikan bekerja dari rumah adalah keharusan. Tentu saja terdapat perbedaan besar. Beberapa organisasi/perusahaan memang sudah siap melaksanakan bahkan telah melaksanakan skema bekerja dari rumah baik sebagian maupun seluruh pegawai. Sementara bagi organisasi/perusahaan yang tidak siap, penerapan bekerja dari rumah cukup merepotkan pada awalnya, walaupun dengan berjalannya waktu sedikit demi sedikit para pegawai dapat menyesuaikan diri. (hlm. 139)

Salah satu kegiatan yang tidak luput dari pemberlakuannya WFH adalah kegiatan belajar-mengajar. Untuk menekan angka persebaran virus Covid-19, pemerintah menerbitkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 719/P/2020. Melalui keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut, diputuskan bahwa daerah yang termasuk dalam kondisi khusus dapat melaksanakan kurikulum sesuai kebutuhannya. Dalam lampiran surat keputusan menteri tersebut, terdapat pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus.

Dalam pemahaman umum, kondisi khusus inilah yang menimbulkan adanya kurikulum darurat. Melalui halaman web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi, kurikulum darurat adalah kurikulum yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk dapat menentukan kebutuhan yang sesuai bagi pembelajaran peserta didik. Konsep dari kurikulum darurat ini tetap mengacu pada kurikulum 2013 namun lebih disederhanakan, dan setiap capaian belajar tidak diwajibkan untuk dipenuhi dalam rangka menentukan kelulusan peserta didik.

Keputusan ini juga turut mendukung situasi pendidikan yang turut diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara *Work From Home* atau WFH. Adanya fleksibilitas dalam melaksanakan pembelajaran dan tidak terpaku dalam capaian pembelajaran dari kurikulum 2013, membuat berbagai satuan pendidikan dapat menyesuaikan keadaan dengan mengubah sistem pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Umumnya, kondisi ini disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.

Menurut Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012 pasal 31, Pembelajaran Jarak Jauh atau disingkat menjadi PJJ memiliki arti sebagai suatu proses pembelajaran yang dilaksanakam secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi dan informasi. PJJ ditujukan sebagai sarana pembelajaran yang dapat dilakukan untuk menjangkau peserta didik yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara reguler atau tatap muka. Umumnya, disaat pandemi covid-19 berlangsung, PJJ dilaksanakan dengan media elektronik dan bertempat didalam jaringan(daring).

Meski demikian, pembelajaran tanpa tatap muka atau dengan istilah Pembelajaran Jarak Jauh atau disingkat menjadi PJJ, tidak sepenuhnya efektif dan menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Sedikitnya terdapat 3 pihak dalam proses pendidikan yang merasakan dampak secara langsung dari kegiatan PJJ, yaitu; pendidik, peserta didik, dan orang tua murid. Berbagai dampak negatif atau kendala yang dirasakan oleh ketiga pihak ini umumnya bermula dari ketidaksiapan melaksanakan PJJ dari segi teknis dan perencanaan.

PJJ menggunakan media elektronik dalam komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, namun tidak sepenuhnya berfungsi dengan semestinya. Sofianto &

Zuhri, (2021) menyatakan; Kendala teknis yang dihadapi siswa antara lain masalah paket data/kuota internet dan keterbatasan perangkat. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang menyebabkan pemenuhan untuk belanja kuota atau paket data juga kurang. Masalah teknis lainnya adalah buruknya sinyal internet di lokasi tempat tinggalnya, terutama di pedesaan (hlm. 183). Adanya berbagai hambatan dalam fasilitas baik dari media elektronik hingga koneksi jaringan internet, membuat berbagai daerah yang tidak memiliki fasilitas pendukung yang memadai kesulitan untuk melaksanakan PJJ secara efektif.

Permasalahan yang menjadi lanjutan dari kendala tersebut adalah adanya kekurangan dalam kualitas belajar mengajar. Pembelajaran jarak jauh yang terkendala dari hal mendasar seperti sinyal menyebabkan interaksi antara pendidik dengan peserta didik tidak optimal, serta menghambat penyampaian materi yang tergolong kompleks. Tidak optimalnya interaksi antara pendidik dengan peserta didik, beresiko menimbulkan kurangnya fokus selama kegiatan pembelajaran, "...ada kecenderungan siswa menunjukkan gejala kejenuhan baik karena kurang interaksi, kurang aktivitas, maupun terlalu banyak tugas." (Sofianto & Zuhri, 2021, hlm. 182)

Pada saat bersamaan, seorang siswa belum tentu mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran secara mandiri dengan efektif. Hal ini dicerminkan secara tidak langsung oleh kurangnya pemahaman siswa akan strategi dalam melaksanakan pencarian informasi saat belajar. Nuthoyyibah & Agustina, (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa peserta didik terdorong untuk mengakses lebih banyak informasi yang mempengaruhi proses pencarian informasi karena pandemi Covid-19 yang memaksa kegiatan pembelajaran.

Pada simpulannya, Nuthoyyibah & Agustina, (2021) menyatakan bahwa dalam proses pencarian informasi tersebut, sebagian siswa belum memahami strategi yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Sebagian besar pencarian informasi dilakukan secara berjejaring, meskipun tidak meninggalkan koleksi perpustakaan sebagai penunjang belajar dan juga guru sebagai fasilitator di sekolah.

Kondisi dimana siswa belum mampu mencapai hasil pembelajaran yang maksimal dapat memberikan ancaman yang besar terhadap kegiatan pembelajaran.

Ancaman yang timbul dari permasalahan diatas adalah terjadinya *Learning Loss*. *Learning loss* dapat diartikan sebagai hilangnya kemampuan dalam keterampilan maupun pengetahuan dalam diri peserta didik. Fenomena ini memiliki penyebab yang nyaris mirip dengan poin-poin yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PJJ. Seperti yang diungkapkan oleh Muthmainnah & Rohmah (2022), penyebab dari *Learning Loss* adalah; (1) Pembelajaran jarak jauh yang membosankan, (2) Anak sulit konsentrasi saat pembelajaran, (3) Jaringan internet yang tidak memadai, dan (4) Adanya kesulitan memahami materi dari pendidik.

Sebuah penelitian dengan judul “*Learning Loss* Akibat Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia” yang dilaksanakan oleh Cerelia Jessica J, dkk menyimpulkan bahwa daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan atau disingkat menjadi 3T, beresiko tinggi mengalami *learning loss*. *Learning Loss* merupakan kondisi dimana peserta didik kehilangan kemampuan dan pengembangan diri yang diakibatkan oleh situasi tertentu, yang dimana pada kasus ini adalah tidak adanya pembelajaran tatap muka dan diberlakukannya PJJ.

Kondisi ini memperkeruh keadaan dunia pendidikan Indonesia yang sejak awal berada dalam situasi darurat pendidikan yang ditandai oleh rendahnya tingkat literasi. Dengan demikian, untuk membenahi situasi pendidikan pasca covid-19, kemendikbud menyusun suatu kurikulum baru yang disebut kurikulum merdeka. Dilansir dari laman kemendikbud, kurikulum merdeka dapat diartikan sebagai kurikulum yang memiliki program pembelajaran intrakurikuler yang beragam dan memuat konten edukasi yang optimal agar peserta didik memiliki kesempatan untuk mendalami kompetensi yang ingin dicapai. Dalam kurikulum merdeka, pendidik juga diberikan kebebasan dalam menentukan media dan perangkat ajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan dan kesesuaian minat peserta didik.

Seperti yang telah disampaikan dari pernyataan diatas, kurikulum merdeka diadakan untuk mengisi celah kekosongan dalam pendidikan yang ditimbulkan dari fenomena *learning loss*. Maka dari tujuan tersebut dalam karya susunan Anggraena et al., (2021) berjudul “Kajian Kurikulum Untuk Pemulihan Pembelajaran” menyebutkan bahwa dalam kurikulum merdeka ini memiliki prinsip yang digunakan yaitu:

1. Sederhana agar mudah dipahami dan diimplementasi
2. Fokus pada kompetensi dan karakter peserta didik
3. Fleksibel
4. Selaras
5. Bergotong Royong
6. Memperhatikan hasil kajian dan umpan balik

Dengan demikian, tujuan utama dari kurikulum merdeka ini adalah untuk memberikan kebebasan bagi para guru atau tenaga pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, serta memberikan kebebasan pula kepada peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk melepas belenggu tugas-tugas administratif yang dibebankan kepada guru, dan tuntutan pencapaian kompetensi yang dipetakan secara sentralistik oleh dinas pusat, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih leluasa dalam memilih alur pembelajaran yang diinginkan.

Akan tetapi, dengan adanya proses transisi dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, setiap guru perlu melakukan adaptasi dalam proses mengajarnya. Hal ini disebabkan dengan adanya berbagai perubahan dalam proses pengajaran, serta sistem dalam pemberian materi ajar. Seperti ditekankannya fleksibilitas dalam waktu pengajaran, serta dirubahnya sistem dalam penjurusan di tingkat SMA.

Proses transisi ini juga berdampak pada proses pengajaran serta bagaimana para guru akan melakukan kegiatan pengajaran. Dalam proses pengajaran, adanya berbagai perubahan dalam sistem pengajaran yang diatur oleh pemerintah pusat

akan mendorong para guru untuk ikut merubah poin-poin pengajaran yang diterapkan pada kurikulum yang lalu. Selain itu, dalam proses pengajarannya, kurikulum merdeka melakukan beberapa perubahan dalam materi ajar serta sistem penjurusan pada peserta didik di tingkat SMA.

Kurikulum merdeka menambahkan kerangka dari kurikulum 2013 dengan adanya pengembangan profil Pancasila. Pada tingkat SMA, peserta didik pada kelas X tidak langsung diberikan penjurusan dan masih diberikan mata pelajaran yang umum dan tidak terkonsentrasi pada satu jurusan antara MIPA dan IPS. Selain itu, dengan digantinya capaian belajar dari yang semula terpaku pada tolak ukur KD dan KI sedangkan kurikulum merdeka menggantinya dengan satuan fase yang dimulai sejak tingkat PAUD. Pada tingkat SMA, fase yang ditargetkan untuk menjadi capaian pembelajaran pada peserta didik adalah fase E dan F, dimana fase E terkhusus untuk peserta didik kelas X dan fase F untuk kelas XI dan XII.

Pembelajaran dengan capaian pembelajaran ini juga mengganti pendekatan dalam pengajaran pada kurikulum sebelumnya dimana pendekatan saintifik menjadi kewajiban dalam pengajaran semua mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum merdeka, pendekatan dalam pengajaran maupun pembelajaran, dibebaskan dan terdiferensiasi tergantung dari capaian pembelajaran peserta didik yang akan dituju. Dengan demikian, guru mendapat kebebasan untuk memilih metode pengajaran yang dinilai efektif sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, baik dari segi latar belakang peserta didik, maupun mata pelajaran yang diajarkan.

Dengan demikian, berdasarkan pengamatan peneliti mengenai transisi kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka, guru atau tenaga pendidik perlu mencari beragam informasi untuk memenuhi kegiatan belajar mengajarnya. Guru perlu menentukan informasi apa saja yang dibutuhkan, melacak dan menemukan sumber yang dipercaya, kemudian mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan yang timbul dalam proses pencarian informasi tersebut. Para guru

Maka dari itu peneliti menemukan sebuah sekolah tingkat SMA yang masih dalam proses transisi dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, yaitu

SMAN 1 Cibinong Cianjur. Pada praktiknya, di SMAN 1 Cibinong Cianjur, kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 masih dilaksanakan secara bersamaan dengan cara menggunakan kurikulum merdeka untuk peserta didik kelas X dan XI, dan kurikulum 2013 untuk peserta didik kelas XII. Situasi ini dinilai oleh peneliti sebagai kondisi yang ideal untuk melaksanakan penelitian mengenai perilaku pencarian informasi oleh guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka karena di SMAN 1 Cibinong Cianjur masih ada pengajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 sebagai pembanding yang jelas.

Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Perilaku Pencarian Informasi Guru Dalam Melaksanakan Kurikulum Merdeka (Studi Deskriptif Pada SMAN 1 Cibinong Cianjur).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membagi rumusan masalah menjadi dua, yaitu rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus.

1.2.1 Rumusan Masalah Umum

Bagaimana perilaku informasi guru SMAN 1 Cibinong Cianjur dalam melaksanakan kurikulum merdeka?

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus

- a. Apa saja informasi yang dibutuhkan oleh guru SMAN 1 Cibinong Cianjur dalam memenuhi kebutuhan materi ajar dalam kurikulum merdeka?
- b. Darimana sumber informasi yang diperoleh oleh guru di SMAN 1 Cibinong Cianjur untuk memenuhi kebutuhan materi ajar dalam kurikulum merdeka?
- c. Bagaimana perilaku pencarian informasi para guru SMAN 1 Cibinong Cianjur dalam menunjang kebutuhan materi ajar dalam kurikulum merdeka?
- d. Hambatan apa yang timbul dalam kegiatan pencarian informasi kepada para guru SMAN 1 Cibinong Cianjur dalam menunjang kebutuhan materi ajar dalam kurikulum merdeka?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan didasari rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini juga terbagi menjadi dua, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui perilaku informasi guru SMAN 1 Cibinong Cianjur dalam menunjang kebutuhan materi pengajarannya.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh guru SMAN 1 Cibinong Cianjur dalam menunjang kebutuhan materi pengajarannya dalam kurikulum merdeka.
- b) Untuk mengetahui darimana sumber informasi yang diperoleh oleh guru SMAN 1 Cibinong Cianjur dalam menunjang kebutuhan materi pengajarannya dalam kurikulum merdeka.
- c) Untuk mengetahui bagaimana perilaku pencarian informasi para guru SMAN 1 Cibinong Cianjur dalam menunjang kebutuhan materi pengajarannya dalam kurikulum merdeka.
- d) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam proses pencarian informasi oleh para guru SMAN 1 Cibinong Cianjur dalam menunjang kebutuhan materi pengajarannya. dalam kurikulum merdeka.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis berharap hasil penelitian ini dapat menghasilkan dua jenis manfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam berbagai perencanaan dan pengadaan bahan ajar bagi guru. Selain itu, juga untuk memberikan gambaran mengenai perilaku pencarian informasi guru khususnya di SMAN 1 Cibinong Cianjur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi peneliti; memberikan pemahaman mengenai kebutuhan informasi dan perilaku pencarian informasi. Selain itu juga untuk memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan dalam karya tulis dengan harapan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan pengetahuan bagi para pegiat pendidikan.